

ISSN : 0126-396X

Dialog

Vol. 72, No. 2, Tahun. XXXIV, Nopember 2011

Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan

Pasang Surut Politik Islam

Jurnal Dialog	Nomor 072	Tahun XXXIV	Halaman 150	Jakarta Nop 2011	ISSN 0126-396X
------------------	--------------	----------------	----------------	---------------------	-------------------

Terakreditasi C No: 362/AU1/P2MBI/07/2011

Terakreditasi C No:
362/AU1/P2MBI/07/2011
ISSN : 0126-396X

Pemimpin Umum:

Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA.

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:

DR.H.M. Hamdar Arraiyyah, M.Ag.

Wakil Pemimpin Redaksi:

H. Wahyudi, S.Pd.

Sekretaris Redaksi:

Hj. Astuti Nilawati, S.Pd.

Mitra Bestari:

1. Prof. Dr. H.M. Atho Mudzhar, M.A.
2. Prof. Dr. H. Komarudin Hidayat, M.A.
3. Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar
4. Prof. Dr. H. Masykuri Abdillah

Dewan Redaksi:

1. Prof. Dr. H. Abdurrahman Mas'ud, M.A.
2. Dr.H. Imam Tholkhah
3. Drs. H. Muhammad Shohib, M.A.
4. Drs. Choirul Fuad Yusuf, SS, M.A.
5. H. Chamdi Pamudji, SH, MM.
6. Drs. H. Praptono Zamzam, M.Sc.

Redaktur Eksekutif:

M. Nasir, S.Th.I

Redaktur Pelaksana:

1. Abas Jauhari, MSI.
2. Umu Rahmah

Administrasi:

1. Mulyadi Azwan
2. Dra. Hj. Aini Moerad
3. Willa Widdharari, S.Kom.

Alamat Redaksi:

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama
Gedung Kementerian Agama
Jl. M.H. Thamrin No.6 Jakarta Pusat
Telp (021) 31924509 pes.277/271 fax.(021) 3920380
Website: www.Balitbangdiklat.kemenag.go.id

PENGANTAR REDAKSI

PASANG SURUT POLITIK ISLAM

Relasi antara Islam dan politik di Indonesia memiliki perjalanan sejarah yang cukup panjang, dan mengalami pasang surut. Politik identitas yang coba ditampilkan oleh umat Islam melalui perwakilan tokoh-tokohnya mengalami kekalahan, di antaranya ketika tujuh kata dalam piagam Jakarta dihapus. Meskipun begitu keberhasilan politik Islam pada pemilu pertama menunjukkan prestasi yang cukup baik dengan tercatat sebagai partai pemenang kedua (Masyumi) dan ketiga (NU) setelah PNI. Namun keberhasilan yang ditunjukkan umat Islam pada pemilu tahun 1955 rontok pada masa Presiden Soekarno dengan penerapan Demokrasi Terpimpinnya. Apalagi setelah tokoh-tokoh penting

Jurnal Dialog diterbitkan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, sebagai media informasi dalam rangka mengembangkan penelitian dan kajian keagamaan di Indonesia. Dialog berisi tulisan ilmiah dan hasil penelitian dan pengembangan terkait dengan masalah keagamaan. Redaksi mengundang para peneliti agama, intelektual dan akademisi untuk mengkomunikasikan gagasan secara ilmiah dan kreatif bagi pengembangan penelitian maupun kajian keagamaan di Indonesia

partai Masyumi dipenjarakan oleh sang presiden, keperkasaan politik umat Islam sedikit memudar.

Gerakan reformasi pasca berakhirnya orde baru telah mengubah wajah perpolitikan Indonesia, demikian pula perpolitikan umat Islam. Kondisi negara yang cenderung tidak setabil menuntut berbagai pihak merasa perlu untuk mendesakkan demokrasi, kebebasan, transparansi, akuntabilitas publik, atas persoalan-persoalan bangsa, berkaitan dengan seluruh tatanan masyarakat. Tak ayal pertentangan dan konflik sosial terus terjadi. Berbagai kepentingan, baik yang mendasari atas nama bangsa dan kelompok tertentu, juga ikut mewarnai.

Terbukanya kran kebebasan dalam berpendapat, berkumpul, dan berserikat menjadi salah satu pendorong menguatnya gerakan masyarakat sipil. Di satu sisi, gerakan ini menjadi harapan karena mampu mendorong dan menjadi stabilisator pemerintahan, namun di saat yang lain semakin mengancam. Kegetiran masyarakat atas berbagai persoalan terutama dalam hal ekonomi, politik, dan degradasi moral menjadikan masyarakat mencari alternatif baru.

Salah satunya adalah munculnya berbagai pemikiran politik Islam yang kemudian melahirkan banyak gerakan. Konsolidasi di tingkatan negara terus dilakukan, namun pada saat yang sama, terdapat konsolidasi internal di kalangan umat Islam. Eksistensi Islam politik pada masa kemerdekaan dan sampai pada pasca revolusi pernah dianggap sebagai pesaing yang dapat mengusik basis kebangsaan negara. Persepsi tersebut membawa implikasi terhadap keinginan negara untuk berusaha menghalangi dan melakukan

domestikasi terhadap gerak ideologis politik Islam. Sebagai hasil dari kebijakan semacam ini, bukan saja para pemimpin dan aktifis politik Islam gagal untuk menjadikan Islam sebagai ideologi dan atau agama negara. Tetapi mereka juga sering disebut sebagai kelompok yang secara politik "minoris" atau "outsider". Lebih dari itu, bahkan politik Islam sering dicurigai sebagai anti ideologi Negara Pancasila. Gejala menurunnya ketegangan hubungan antara Islam dan Negara mulai terlihat pada pertengahan tahun 1980-an. Hal ini ditandai dengan semakin besarnya peluang umat Islam dalam mengembangkan wacana politiknya serta munculnya kebijakan-kebijakan tersebut berspektrum luas.

Munculnya partai-partai Islam di Indonesia telah menimbulkan perdebatan tersendiri. Dalam pandangan sementara kalangan, fenomena itu dinilai sebagai perwujudan dari hadirnya kembali politik Islam, atau ada yang mengistilahkan sebagai "repolitikasi Islam". Ketika berhadapan dengan kekuasaan dan negara, politik Islam di Indonesia sering berada pada posisi dilematis. Dilema yang dihadapi menyangkut tarik-menarik antara tuntutan untuk aktualisasi diri secara determinan sebagai kelompok mayoritas dan kenyataan kehidupan politik yang tidak selalu kondusif bagi aktualisasi diri tersebut. Sebagai akibatnya, politik Islam seringkali dihadapkan pada beberapa pilihan strategis yang masing-masing mengandung konsekuensi dalam dirinya.

Jurnal Dialog vol. 72 XXXIV, 2011 ini mencoba menyoroti Pasang Surut dan Fragmentasi Politik Islam di Indonesia. Kajian Jurnal Dialog edisi ini diawali dengan tulisan M. Firdaus

Khalimi tentang *Memahami Politik Masyarakat Muslim*. Dilanjutkan dengan tulisan Muhammad Himawan Sutanto, yang menulis tentang *Kegagalan Partai Politik Islam : Kegagalan Agenda Setting?* Sedangkan Miftahussurur menghadirkan tulisannya tentang *Pasang Surut dan Fragmentasi Politik Islam di Indonesia*. Ifa Avianty dan Thobib Al-Asyhar menghadirkan tulisan tentang *Perubahan Paradigma Peran Politik Pemuda Islam Indonesia dari Masa Ke Masa*. Edisi ini kian menarik dengan hadirnya tulisan Herdi Sahrasad tentang *Reformasi Mesir: Berkaca pada Indonesia?* dan Ihsan Ali-Fauzi yang menghadirkan tulisan tentang *"Paradigma Karbala dan Protes Politik Kaum Syi'ah*. Kajian semakin lengkap dengan hadirnya tulisan Abdul Waid tentang *Populisme Akar Ketahanan Politik Identitas: Refleksi Pasang Surut Politik Islam dari Era Orde Lama hingga Era Orde Reformasi*.

Pada edisi ini juga dihadirkan kajian Ismatu Ropi tentang Rohis: *Dari Pencarian Identitas ke Ideologisasi Agama*, dan tulisan Nursh Shalihin Djamra tentang *Rasionalisasi Agama dalam Arena Politik: dari Pilihan Ideologis ke Pertimbangan Rasional*. Kajian ini diakhiri dengan telaah buku yang berjudul *Negara Islam* karangan Musdah Mulia. Buku ini secara umum mengurai dan mengulas pemikiran Haikal tentang negara Islam. Semoga kajian yang dihadirkan Jurnal Dialog edisi ini memberikan manfaat bagi para pembaca, khususnya dalam kajian politik Islam, khususnya di Indonesia. Selamat Membaca!

Redaksi

DAFTAR ISI

TOPIK

FIRDAUS KHALIMI

Memahami Politik Masyarakat Muslim — 1

MUHAMMAD HIMAWAN SUTANTO

Kegagalan Partai Politik Islam : Kegagalan Agenda Setting ? — 12

MIFTAHUSSURUR

Pasang Surut dan Fragmentasi Politik Islam di Indonesia — 26

IFA AVIANTY DAN THOBIB AL-ASYHAR

Perubahan Paradigma Peran Politik Pemuda Islam Indonesia dari Masa Ke Masa — 44

HERDI SAHRASAD

Reformasi Mesir : Berkaca pada Indonesia? — 63

IHSAN ALI FAUZI

Paradigma Karbala dan Protes Politik Kaum Syi`ah — 83

ABDUL WAID

Populisme Akar Ketahanan Politik Identitas : Refleksi Pasang Surut Politik Islam dari Era Orde Lama Hingga Era Orde Reformasi — 97

PENELITIAN

ISMATU ROPI

Rohis: Dari Pencarian Identitas ke Ideologisasi Agama — 114

NURUS SHALIHIN DJAMRA

Rasionalisasi Agama dalam Arena Politik: Dari Pilihan Ideologis ke Pertimbangan Rasional — 126

BOOK REVIEW

MEILANI DEWI

Mengurai Pemikiran Haikal tentang Negara Islam — 140

POPULISME AKAR KETAHANAN POLITIK IDENTITAS: REFLEKSI PASANG SURUT POLITIK ISLAM DARI ORDE LAMA HINGGA ORDE REFORMASI

OLEH: ABDUL WAID*

ABSTRAK

The force of Islam politics always goes through ebb and flow. Unfortunately, the Islam politics has never been a main force in political arena of Indonesia, whereas the most population of Indonesia is muslim. This article addresses the question what strategy should be implemented to make Islam politics survive longer and longer. As the result, the unity of Islam politics' vision and mission is an urgent to do. To do this, Islam politics must have one figure that is able to unify the fragmented muslims in many parties by campaigning the populism politics movement to defend political identity (Islam) and is able to do reconciliation Islamic parties to garner more than 60% votes in election.

Kekuatan politik Islam selalu mengalami pasang surut. Sayangnya, politik Islam tidak pernah menjadi kekuatan utama dalam kancah perpolitikan Indonesia, sementara populasi terbesar penduduk Indonesia beragama Islam. Artikel ini mengajukan pertanyaan strategi apa yang seharusnya diterapkan oleh partai politik untuk tetap survive lebih lama. Sebagai hasilnya atau jawabnya adalah penyatuan visi dan misi politik Islam perlu segera dilakukan. Politik Islam harus memiliki satu figure yang mampu menyatukan umat Islam yang terfragmentasi ke dalam banyak partai dengan mengkampanyekan gerakan politik populis untuk mempertahankan politik identitas (Islam) dan mampu melakukan rekonsiliasi partai-partai Islam untuk meraup lebih dari 60% suara di dalam pemilihan.

Kata-kata kunci:

Partai politik, politik Islam, populis, politik identitas

* Abdul Waid, S.H.I., M.S.I., adalah alumnus Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, e-mail: a_waid04@yahoo.com.

Pendahuluan

Bila William Montgomery Watt (1909-2006), seorang pakar studi-studi keislaman sekaligus orientalis dan sejarawan utama tentang Islam dan dunia Barat, melihat kenyataan perkembangan politik Islam di Indonesia saat ini, barangkali ia akan terkejut dan merasa “salah”. Jauh sebelum orientalis berkebangsaan Amerika ini wafat, Montgomery Watt mengatakan dengan optimis, Islam akan dapat menjadi salah satu dari kekuatan politik yang sangat berarti bagi dunia menjelang tahun 2000. Alasannya sederhana, menurut Montgomery Watt, tradisi Islam yang tidak pernah memisahkan antara politik dan agama menjadi penyebabnya.¹

Namun, memasuki abad ke-21, analisa Montgomery Watt dapat dibilang tidak pernah terbukti kebenarannya.

Di satu sisi, banyak kalangan sebenarnya yang meragukan statemen Montgomery Watt, karena tidak didukung dengan alasan dan analisis yang matang. Apalagi, statemen Montgomery Watt—sebagaimana yang tertulis dalam beberapa bukunya—seakan menyamaratakan (baca: memastikan) bangkitnya kekuatan politik Islam di setiap negara. Di sisi lain, sebagian kalangan mempersepsi bahwa statemen Montgomery Watt hanya relevan dalam konteks wilayah dan negara tertentu, tidak berlaku secara universal. Pasalnya, fakta di lapangan memperlihatkan, beberapa negara muslim seperti Maroko, Aljazair, Tunisia, Sudan, dan sejumlah negara lainnya memang memperlihatkan gelagat unggulnya kekuatan politik Islam. Namun, di beberapa negara lain justru menampakkan gelagat sebaliknya. Misalnya, di negara Turki justru politik Islam menempati posisi kelas paling bawah, bahkan menjadi obyek diskriminasi kekuatan politik sekuler. Lebih dari itu, kekuatan politik Islam justru dianggap sebagai sebuah ancaman demokrasi di Turki. Sehingga, dalam beberapa tahun terakhir, politik Islam di Turki terancam dibubarkan. Hal yang tidak jauh berbeda juga terjadi di Indonesia. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai analisis Montgomery Watt tentang kekuatan politik Islam, baca, William Montgomery Watt, *Islamic Political Thought*, (London: Edinburgh University Press, 1998), hlm. 201-245.

Dalam konteks Indonesia, misalnya, dalam catatan sejarah, partai politik berbasis Islam memang pernah menjadi kekuatan politik terbesar kedua—tidak hanya sekadar menjadi partisipan tanpa mendatangkan prestasi—dan mengungguli seluruh kekuatan politik lain. Dengan kata lain, isu “agama Islam” dalam percaturan politik di tanah air tidak hanya menjadi obyek, akan tetapi pernah menentukan sendiri yang berarti menjadi subyek.

Sebagai contoh nyata, pada Pemilu tahun 1955, partai-partai politik berlandaskan Islam memperoleh suara yang signifikan, meskipun pada kenyataannya belum mampu menjadi pemenang utama. Hasil pemilu pada saat itu menempatkan Partai Islam Masyumi sebagai pemenang kedua setelah Partai nasional Indonesia (PNI) dengan perolehan suara 20,9% atau 57 kursi. Partai Islam Nahdlatul Ulama (NU) berhasil memperoleh 18,4% suara atau 45 kursi dan berada di tempat ketiga. Sedangkan peringkat kelima diraih oleh Partai Serikat Islam Indonesia (PSSI).²

Namun, faktanya, kecuali di beberapa negara lain, sejak pemilu tahun 1955 partai Islam di Indonesia tidak pernah tampil sebagai pemenang utama dalam jagad raya perpolitikan tanah air. Tidak mengherankan bila muncul sebuah pernyataan klise, partai politik berbasis Islam di Indonesia

² Walaupun partai-partai yang berbasis Islam tidak menjadi pemenang utama dalam pemilu di tahun 1955, namun suara yang diraih beberapa partai Islam merata, maka secara kumulatif sebenarnya parlemen banyak dihuni oleh kelompok Islam sebagai representasi dari partai berbasis Islam. Sehingga, tidak sedikit produk legislasi di DPR justru didominasi oleh kekuatan kelompok partai Islam. Lihat, Muhammad Asfar, *Pemilu dan Perilaku Memilih, 1955-2004*, (Jakarta: Eureka, 2006), hlm. 76.

nampaknya hanya pandai menyerang dan meraih kekuasaan, namun tidak pandai—dengan tidak mengatakan lemah—mempertahankan kekuasaan. Beberapa partai Islam di Indonesia setidaknya pernah eksis dan meraih kursi di parlemen, namun pada akhirnya dengan mudah tersingkir dari parlemen.³ Fakta ini mengindikasikan bahwa kekuatan Islam politik masih terus mengalami pasang surut.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, mengapa partai politik Islam tidak pernah menjadi kekuatan utama dalam kancah perpolitikan di Indonesia? Jawaban atas pertanyaan ini tidak bisa dilepaskan dari pertanyaan lanjutan, strategi apa yang layak diterapkan oleh partai politik Islam agar mampu eksis di belantara politik Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan diulas secara mendalam dalam tulisan ini sebagai tawaran solusi dalam rangka rekonstruksi prestise politik Islam di Indonesia.

Kesatuan Visi Keislaman

Sebagai sebuah fakta dan kenyataan di lapangan, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kemunduran politik Islam tidak bisa terbantahkan lagi. Tetapi, bila ditelaah lebih jauh, kemunduran politik

³ Pemilu 2009, misalnya, beberapa partai politik yang berbasis Islam harus tersingkir dari senayan karena tidak lolos ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*), seperti PBB (Partai Bulan Bintang) pimpinan Yusril Ihza Mahendra, dan PBR (Partai Bintang Reformasi) yang sempat dipimpin oleh mendiang Zainudin MZ. Padahal, sebelumnya, pada Pemilu tahun 2004 kedua partai tersebut berhasil meraih beberapa kursi dan berhasil melayang ke senayan. Dalam Pemilu 2009, sangat disayangkan, posisi kedua partai tersebut harus digantikan oleh partai nasionalis sebagai pendatang baru namun mampu merebut kursi di senayan, yaitu Partai Gerindra dan Partai Hanura.

Islam di Indonesia adalah sebuah hal ironis. Pasalnya, *pertama*, lebih dari 85% masyarakat pemilih di tanah air adalah beragama Islam.⁴ Bahkan, para pemilih partai nasionalis sebenarnya berasal dari kelompok Islam. *Kedua*, runtuhnya era otoritarianisme, baik di masa orde lama maupun orde baru dan diganti dengan orde reformasi yang menekankan demokrasi. Di era orde reformasi seperti saat ini, selayaknya para tokoh politik dari kelompok Islam mampu bersaing dengan para tokoh politik dari kalangan nasionalis. Sebab, orde reformasi menekankan kebebasan berekspresi, penegakan hak asasi manusia, sehingga siapa saja boleh tampil, boleh berkompetisi, tanpa halangan sedikit pun dari tirani penguasa.

Berbeda halnya dengan orde lama maupun orde baru di mana otoritarianisme penguasa masih sangat kental sehingga mempengaruhi sikap politik Islam. Misalnya, salah satu penyebab runtuhnya politik Islam pascapemilu 1955 dan mundurnya keperkasaan yang ditunjukkan para tokoh politik dari kelompok Islam pada masa Presiden Soekarno adalah hilangnya para elite politik partai Masyumi dari panggung politik. Penyebabnya adalah, atas alasan penerapan demokrasi terpimpin yang dikendalikan Soekarno—sebuah kedok dari sikap otoritarianisme penguasa demi kepentingan politik semata—banyak tokoh penting partai Masyumi dipenjarakan oleh sang presiden.⁵

⁴ "Sejarah Indonesia Modern 1200-2008", terj. A. History of Modern Indonesia Since c. 1200 Fourth Edition karya M.C. Ricklefs, (Jakarta: Penerbit Serambi, 2008), hlm. 67.

⁵ Karena alasan memiliki ide yang dapat membahayakan pemerintah, beberapa tokoh politik dari

Situasi yang tidak jauh berbeda juga terjadi di masa orde baru yang dipimpin Presiden Soeharto. Setiap tokoh politik yang dianggap membahayakan ruang politik penguasa, dipenjarakan dengan beragam alasan hukum yang terkesan “dipaksakan” yang disebut tahanan politik (tapol). Implikasinya, kekuatan politik umat Islam sedikit memudar, bahkan bisa dikatakan hilang dari permukaan. Tetapi, saat ini rezim otoritarianisme telah tumbang. Lantas, apa alasan rasional yang membuat kekuatan politik Islam cenderung menurun?

Salah satu faktor yang menyebabkan melemahnya kekuatan politik Islam dalam percaturan politik tanah air adalah tidak adanya figur tokoh (pemimpin) yang bisa menyatukan visi keislaman, bahkan menyatukan komunitas muslim menjadi satu kelompok politik. Padahal, sebagaimana yang ditulis Keith Laybourn dalam pengantar bukunya *Fifty Key Figures in Twentieth-Century British Politics* (2002), seorang figur pemimpin sangat dipentingkan dalam politik, bahkan bisa menjadi kekuatan utama dalam politik.⁶ Tidak adanya figur tokoh yang mampu menyatukan komunitas muslim

sebagai satu kekuatan politik inilah—selain disebabkan oleh faktor egoisme di antara kalangan elite kelompok politik Islam—yang menceraiberaikan kekuatan politik Islam menjadi ragam kelompok kecil. Naifnya lagi, setelah bercerai berai menjadi kekuatan-kekuatan kecil, muncul “pertikaian” antara satu kelompok politik Islam dengan kelompok politik Islam yang lain.

Perpecahan antara NU dengan partai Islam Masyumi, misalnya. Pada mulanya NU berada dalam satu kelompok politik dengan partai Islam Masyumi. Namun, karena muncul konflik internal di tubuh Masyumi, khususnya mengenai pendelegasian calon menteri agama,⁷ maka NU meninggalkan Masyumi dan memutuskan menjadi partai baru. Di era reformasi, demikian pun, perpecahan antara kalangan elite politik Islam juga jerap terjadi. Tentu kita tidak bisa melupakan pecahnya elite PKB yang melahirkan PKNU, pecahnya elite PAN yang melahirkan PMB, konflik antara Abdurrahman Wahid dan Muhaemin Iskandar, dan beragam cerita miris lainnya yang terjadi antara kalangan elite di internal partai Islam.

Partai Masyumi dan partai yang berbasis Islam lainnya ditahan oleh Soekarno. Padahal, bila mau ditelusuri lebih jauh, penahanan kalangan elite politik Islam sebenarnya adalah salah satu strategi untuk meredam kekuatan politik Islam. Untuk mengalahkan lawan-lawan politiknya, sikap politik penguasa tidak lagi terikat dengan aturan main demokrasi (*democratic rules of the game*). Sebut saja, misalnya, pemenjaraan terhadap tokoh politik Islam seperti Mohammad Natsir, Sjafruddin Prawiranegara, Mohammad Roem, Kasman Singodimedjo, Buya Hamka, dan lain sebagainya. Lihat, Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin, 1959-1965*, (Jakarta; Gema Insani, 1996), hlm. 73.

⁶ Keith Laybourn, *Fifty Key Figures in Twentieth-Century British Politics*, (London: Routledge, 2002), hlm. 3

⁷ Konflik antara NU dan partai Islam Masyumi yang mulai meruncing terjadi pada tahun 1952 saat pembentukan kabinet. Konflik itu sebenarnya dipicu oleh perbedaan pendapat antara elite NU dan Masyumi dalam mengutus calon menteri agama. Persoalan pembagian kekuasaan menjadi sangat krusial pada pembentukan Kabinet 1952 karena Masyumi mendapatkan jatah lima kementerian, dan biasanya NU mendapat jatah satu kursi yaitu menteri agama. Namun, kelima jatah tersebut diambil semua oleh Masyumi. Berbagai upaya pengebirian dan peminggiran semacam itu yang menjadikan NU keluar dari Masyumi. Lihat, H. Rozikin Daman, *Membidik NU: Dilema Percaturan Politik NU Pasca Khittah*, (Jakarta: Gama Media, 2001), hlm. 98.

Karena tidak ada figur tokoh yang mampu menyatukan visi keislaman di tengah komunitas muslim, muncul banyak bendera partai yang mengatasnamakan Islam. Tidak bisa dipungkiri, walaupun sama-sama partai Islam namun antara satu partai dengan partai lain akan saling serang, saling sikut, saling tendang—terlepas dari etika persaingan yang sehat—demi untuk meraup suara rakyat.

Dalam Pemilu 2009, misalnya, partai yang berazaskan Islam sebagai peserta pemilu berjumlah 7 Partai, dari 40 Parpol yang bertarung. Ketujuh partai Islam tersebut adalah, Partai Matahari Bangsa (PMB),⁸ Partai Keadilan Sejahtera (PKS),⁹ Partai Persatuan Pembangunan (PPP),¹⁰ Partai Bintang Reformasi (PBR),¹¹ Partai

⁸ PMB adalah partai yang memiliki azas Islam. Azas ini diambil dari nilai luhur perjuangan keumatan dan kebangsaan yang dicontohkan organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah. Para elite politik PMB mengklaim bahwa partai ini berbeda dengan partai Islam yang lain karena azas yang dimiliki sangat cocok dengan nilai keindonesiaan secara kultural dan sosial kemasyarakatan yang mejemuk. PMB adalah pecahan dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang banyak dihuni oleh kalangan elite Muhammadiyah. Lihat, Tim Penulis Pustaka Timur, *Profil Partai Politik Peserta Pemilu 2009: (pedoman pelaksanaan kampanye pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan anggota DPRD, zona dan kelompok kampanye)*, (Jakarta: Pustaka Timur, 2008), hlm. 23.

⁹ Asas Islam PKS diadopsi dari manhaj al-Ikhwaniul Muslimin yang lahir di Mesir pada tahun 1956 dengan metode *murobbi-murobbi, ushroh-usroh, halaqoh-halaqoh* dan *bai'at jama'i*. Warnanya sama dengan partai Islam di Mesir yang bernama *al-Ikwanul Muslimun*. al-Ikhwaniul Muslimun adalah sebuah Ormas Islam yang hingga kini masih eksis di Mesir. *Ibid.*

¹⁰ PPP adalah partai Islam yang berakar dari Parmusi yang dibidani para tokoh Muhammadiyah. Namun, dalam perkembangannya, Muhammadiyah tergeser dari PPP. Akibatnya, para simpatisan PPP lebih dominan dari kalangan tradisional, sehingga didominasi oleh kalangan NU. *Ibid.*

¹¹ PBR adalah partai Islam, partai sempalan (pecahan) PPP. Kerena itu, ideologi dan gerakan PBR mirip dengan PPP. *Ibid.*

Kebangkitan bangsa (PKB),¹² Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU),¹³ dan partai Nahdlatul Ummat (PNU).¹⁴ Dalam hal ini, banyaknya partai Islam yang muncul sebagai kontestan pemilu, hemat saya, bukanlah indikasi faktor kemajuan politik Islam di tanah air. Namun, sebaliknya, justru merugikan kelompok politik Islam sendiri.

Alasan rasionalnya adalah, *pertama*, banyaknya partai Islam justru memecahkan masyarakat Islam di kalangan akar rumput. Artinya, harus diakui bahwa munculnya banyak partai Islam dapat mengecilkan volume suara pemilih dari kalangan umat Islam, karena akibat banyaknya partai Islam tersebut suara umat Islam terbagi ke beberapa kelompok kecil. Bahkan, yang sangat disayangkan adalah, masyarakat Islam di level akar rumput justru mengalihkan pilihannya ke partai nasionalis.

Kedua, dalam banyak hal, lahirnya ragam partai Islam dapat mengancam ukhuwah Islamiah diantara kaum muslim. Pemicunya adalah, secara

¹² PKB adalah partai yang kelahirannya dibidani oleh tokoh-tokoh NU. Bila membaca AD/ART PKB, memang PKB bukanlah partai yang berasas Islam. Namun, karena partai ini dibidani oleh banyak—bahkan hampir secara keseluruhan—tokoh-tokoh penting di NU, maka PKB memiliki massa pemilih dari kelompok Islam tradisional. Tidak mengherankan bila banyak orang yang mengatakan bahwa PKB—meskipun tidak berasaskan Islam—adalah partai yang berbasis Islam. *Ibid.*

¹³ PKNU adalah partai pecahan dari PKB. Akibat konflik internal, beberapa kalangan elite PKB akhirnya memutuskan keluar dari PKB dan mendirikan partai sendiri bernama PKNU. Partai ini berasaskan Islam, sehingga dapat dikatakan sebagai partai Islam. *Ibid.*

¹⁴ PNU adalah partai yang juga berasaskan Islam. Partai ini menyatakan meneruskan perjuangan politik para pejuang jami'iyah NU, sehingga gerakannya juga membidik masyarakat *nahdliyyin* sebagaimana PKB, PPP, maupun PKNU. Partai ini sekarang telah berganti nama menjadi Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (Partai PNU). *Ibid.*

defacto, setiap simpatisan partai Islam akan lebih mengedepankan egosime politik demi mencapai kepentingan politik partainya masing-masing. Perpecahan di beberapa tubuh partai Islam seperti partai Islam Masyumi yang melahirkan Partai NU, PKB yang melahirkan PKNU,¹⁵ PAN yang melahirkan PMB, adalah indikasi konkret adanya egosime politik antarsesama tokoh politik Islam.

Ketiga, pendirian banyak partai Islam membuat friksi dan konflik antar umat Islam semakin meluas. Apalagi, jumlah partai Islam yang kemunculannya sebagai efek euphoria telah *out of control*, sehingga posisi tawar partai Islam belum mampu memberikan warna secara signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik di panggung politik maupun dalam berbagai kebijakan pemerintah.

Oleh karena itu, lahirnya banyak partai politik yang meatasnamakan Islam sebenarnya tidak semata-mata dapat dimaknai sebagai buah demokrasi yang membuka kebebasan berekspresi (baca: kebebasan mendirikan partai). Namun, fenomena itu dapat dimaknai sebagai kuatnya egoisme kalangan politik Islam yang tidak memiliki ijtihad politik atau siyasah untuk menjemput Islam sebagai azas satu kelompok. Maka, jangan heran bila politik Islam tidak pernah menjadi pemenang

utama di kancah perpolitikan nasional. Sebab, kelemahan politik Islam bukan disebabkan oleh faktor eksternal, melainkan sengaja disebabkan oleh faktor internal, yaitu para elite politik Islam yang secara sengaja “menceraiberaikan” masyarakat dari kelompok Islam. Tidak mengherankan pula bila hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menampakkan bahwa hanya 17 persen umat Islam Indonesia yang memilih partai berasas Islam.¹⁶

Sungguh sangat sulit mengharap-kan kejayaan partai politik Islam di masa-masa yang akan datang selama tidak muncul satu kesatuan visi keislaman. Barangkali para elite politik Islam Indonesia perlu belajar dari Nelson Mandela, seorang politisi handal yang berhasil menjadi orang nomor satu di Afrika Selatan. Nelson Mandela mampu menyatukan visi kebangsaan, menyatukan ras, menggerakkan seluruh negeri, hitam dan putih menjadi satu kelompok dengan aman, damai, dan setara. Dalam gerakan politiknya, Nelson Mandela juga belajar dari kesalahan-kesalahan masa lampau untuk membangun rekonsiliasi menjadi satu kelompok.¹⁷

Namun, bila melihat pasang surut politik Islam sejak era erde lama, orde baru, hingga orde reformasi yang banyak diwarnai beragam konflik antar sesama elite politik Islam sendiri demi merebut kekuasaan partai, lemahnya pengorganisasian, dan tiadanya kepemimpinan yang berwibawa, rasanya sulit dibayangkan bahwa seluruh partai politik yang berlandaskan Islam mau mempersatukan diri dalam satu visi

¹⁵ Selain PKNU sebagai pecahan PKB, menjelang pemilu 2014, kini muncul kembali partai baru pecahan elite PKB, yaitu Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia (PKB Indonesia). Munculnya PKB Indonesia yang didirikan oleh Yenny Wahid, putri mendiang Abdurrahman wahid (Gus Dur) sebenarnya adalah bukti nyata kuatnya egosime kalangan elite politik Islam, khususnya di PKB, sehingga secara tidak langsung semakin mengecilkan kekuatan politik Islam itu sendiri.

¹⁶ www.lsi.or.id, diakses tanggal 27 Agustus 2011.

¹⁷ Anthony Sampson, *Mandela: The Authorized Biography*, (New York: Paw Prints, 2008), hlm. 123.

keislaman maupun satu kelompok sebagaimana yang dicontohkan oleh Nelson Mandela di Afrika Selatan.

Problem Dilematik: Konseptual dan Faktual

Problem dilematis lainnya yang menjadi penyebab melemahnya gerakan politik Islam di Indonesia adalah problem konseptual dan faktual. Secara konseptual, terdapat beberapa persoalan yang dialami partai Islam. *Pertama*, ruh politik Islam yang diimplementasikan oleh beberapa partai Islam di Indonesia masih belum menampakkan identitas baku; inklusif¹⁸ atau eksklusif¹⁹ (formalis atau substansialis). Bila melihat kenyataan di lapangan, nampak ketidakjelasan konsep, bahkan inkonsistensi terhadap konsep yang sudah dianut hanya sekadar demi mencapai kepentingan jangka pendek. Contohnya, PKS yang sejak dulu dikenal sebagai partai Islam—bahkan di tubuh partai tersebut melekat stigma Islam radikal dan konservatif²⁰—justru menampakkan

¹⁸ Istilah konsep politik inklusif bermakna keterbukaan sebuah politik atau pun partai terhadap semua golongan, tidak pandang agama apa pun. Dalam gerakannya, politik inklusif menekankan persamaan, keadilan, dan hak individual. Lihat, Abd. Rohim Ghazali, dkk, *Muhammadiyah & Politik Islam Inklusif*, (Jakarta: Maarif Institute for Culture and Humanity, 2005), hlm. 45.

¹⁹ Konsep politik eksklusif adalah lawan dari politik inklusif, yaitu konsep gerakan politik yang hanya menekankan pada kepentingan golongan tertentu. Misalnya, bila sebuah partai politik berbasis Islam, maka struktur kepemimpinan partai, visi dan misi, gerakan politik di lapangan, hanya menekankan pada kepentingan umat Islam. Lihat, Faisal Ismail, *Menabur Inklusivisme, Mengubur Eksklusivisme: Visi dan Misi Islam Pluralis*, (Yogyakarta: Mitra Cendekia, 2005), hlm. 116.

²⁰ Citra PKS sebagai partai Islam konservatif sudah terlalu melekat di benak publik. Tidak hanya karena gerakan partai tersebut yang condong eksklusif, namun juga diindikasikan oleh sikap keagamaan para elite PKS, termasuk juga seluruh jaja-

inkonsistensi gerakan; inklusif atau tetap eksklusif.

Buktinya, pada Munas ke II PKS yang diadakan bulan Juni 2010, ternyata masih menyisakan silang pendapat pro dan kontra tentang perubahan strategi yang dilakukan oleh PKS. Salah satu keputusan hasil Munas yang menimbulkan kontroversi adalah dengan berubahnya PKS dari partai Islam menjadi partai terbuka yang mengedepankan pluralisme dan nasionalisme.²¹

Inkonsistensi yang terjadi di tubuh PKS sebenarnya juga terjadi di partai-partai Islam yang lain. Akibatnya, gerakan politik menjadi sangat lemah karena pesan yang ingin disampaikan sulit ditangkap dengan sempurna oleh publik.

Kedua, ketidaktegasan orientasi partai Islam, termasuk juga cita-cita politik kenegaraan. Pertanyaan publik yang kerap muncul terhadap partai Islam adalah, apakah partai Islam menekankan orientasi ideologis, atau orientasi kebangsaan? Bila mengikuti pemikiran Martin Seliger dalam bukunya yang berjudul *Ideology And Politics* (1976), jika partai Islam berorientasi ideologis, selayaknya partai Islam menekankan pada orientasi tindakan yang berisi kepercayaan yang diorganisasi dalam satu sistem partai yang koheren.²² Dengan kata lain, partai

rannya dan simpatisan di level akar rumput, yang menampakkan konservatisme. Lihat, Nashir Fahmi, *Menegakkan Syariat Islam ala PKS*, (Jakarta: Era Intermedia, 2006), hlm. 123. Lihat juga, M. Imdadun Rahmat, *Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus Ke Gedung Parlemen*, (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2008), hlm. 34.

²¹<http://itempoeti.com/2010/06/pks-dari-eksklusif-ke-inklusif-metamorphosa-ataukah-mimikri/>, diakses tanggal 8 September 2011.

²² Martin Seliger, *Ideology And Politics*, (New York: Allen & Unwin, 1976), hlm. 245.

Islam yang berorientasi ideologis tidak hanya memberikan pandangan dan ajaran tentang sistem politik Islam terhadap publik. Lebih dari itu, orientasi ideologis juga memberikan suatu sistem kepercayaan, ketegasan, sehingga penganutan terhadap ideologi Islam dalam partai akan mendorong para elite menjadi konsisten—bahkan bisa dibilang fanatik—terhadap nilai-nilai yang dibangun oleh ideologinya.

Sebaliknya, jika partai Islam berorientasi kebangsaan, sepantasnya gerakan politik yang dikerahkan *menunjukkan adanya kesetiaan dan pengabdian untuk suatu bangsa, yang perlu dinyatakan dalam sikap kebanggaan partai terhadap bangsa sendiri, khususnya sisi kultur dan kepentingan bangsa. Dengan kata lain, bila partai Islam memang berorientasi kebangsaan, peneguhan orientasi kebangsaan sangat penting dilakukan, salah satunya dengan penegasan Indonesia sebagai rumah bersama sebagai salah satu upaya politik yang harus dilakukan terus menerus oleh gerakan politik Islam.*²³ Bila ini yang memang ditekan, sebenarnya simbol-simbol agama tidak perlu diseret ke ranah politik, sebagaimana yang dilakukan oleh partai nasionalis, seperti Partai Golkar, PDIP, Partai Demokrat, dan lain sebagainya.

Tetapi, bila melihat kenyataan di lapangan, orientasi partai politik Islam tampak mengambang, bahkan seakan-akan tidak percaya diri untuk menunjukkan orientasi yang sebenarnya. PKS, misalnya. Partai ini dengan tegas menyatakan mendukung Indonesia dalam bentuk negara

kesatuan dengan sistem Pancasila sebagai dasar negara. Namun, beberapa penelitian ilmiah menyatakan, PKS adalah salah satu kelompok yang menyimpan agenda terselubung mendirikan negara Islam. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan *The Wahid Institute* pada tahun 2009 yang mensinyalir beberapa kelompok Islam, termasuk PKS, yang menyembunyikan cita-cita ingin mendirikan negara Islam, menggantikan sistem yang sudah baku.²⁴ Selain PKS, muncul rumor bahwa PBB juga bercita-cita ingin mendirikan negara Islam. Inilah salah satu indikasi ketidaktegasan orientasi partai Islam.

Berbeda halnya dengan Partai Islam Masyumi yang secara eksplisit menyantumkan dalam anggaran dasarnya, bahwa Masyumi bertujuan untuk mengaplikasikan ajaran dan hukum Islam dalam individu, masyarakat dan Negara Republik Indonesia menuju keridhaan ilahi.²⁵ Dengan ketegasan ini, masyarakat di level akar rumput dapat membaca dengan jelas ke mana arah perjuangan Masyumi. Bahwa, pada akhirnya kaum muslimin dapat mengatur kehidupannya berdasarkan ajaran dan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadist.²⁶

Kedua persoalan secara konseptual di atas (*tidak adanya identitas baku; inklusif atau eksklusif dan ketidaktegasan orientasi partai Islam serta cita-cita politik kenegaraan*) kemudian melahirkan persoalan dilematik secara faktual. *Pertama,*

²⁴ Abdurrahman Wahid, *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, (Jakarta: Wahid Institute, 2009), hlm. 189.

²⁵ Thohir Luth, *M. Natsir: Dakwah dan Pemikirannya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 44-45

²⁶ *Ibid.*

²³ Simon Philpott, *Meruntuhkan Indonesia: Politik Postkolonial dan Otoritarianisme*, (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2003), hlm. 116.

kesenjangan antara fakta demografis (umat Islam sebagai mayoritas dari total penduduk) dan fakta politik (pemilih partai Islam) di mana fakta yang kedua selalu lebih kecil dari yang pertama. *Kedua*, polarisasi atau fragmentasi politik di kalangan partai Islam dan umat Islam sendiri. *Ketiga*, dilema posisi kepemimpinan elit muslim dalam konteks partai dan struktur sosial umat Islam dengan partai dan struktur sosial masyarakat Indonesia, yang melahirkan kesulitan-kesulitan dilematik dalam mencapai posisi puncak dalam kekuasaan di pemerintahan. Hingga saat ini, secara faktual, harus diakui bahwa ragam persoalan tersebut belum terselesaikan.

Islam Politik VS Islam Kultural

Terdapat dua sisi untuk melihat politik Islam di Indonesia sejak era orde lama hingga orde reformasi seperti saat ini. Sisi pertama, Islam adalah agama yang memiliki konsep dan bentuk yang dijadikan sebagai pijakan tata kelola kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, secara formal, legalistik, dan menyeluruh ke dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sisi yang pertama ini dapat disebut sebagai Islam politik.²⁷

Sisi kedua, Islam adalah nilai-nilai substantif yang dapat menegakkan, membentuk, melandasi, serta mengarahkan bangsa dan negara secara universal. Sisi yang kedua inilah yang dikenal oleh banyak kalangan intelektual muslim dengan istilah Islam

kultural.²⁸ Artinya, dalam konteks ini, agama menjadi milik pribadi-pribadi yang tidak diartikulasikan secara formal.

Bila melihat kenyataan di lapangan, khususnya di era reformasi, dua sisi di atas sama-sama mengalami kesulitan untuk menempatkan peran Islam di dalam kehidupan politik riil di Indonesia. Selain karena faktor ketidakmampuan umat Islam di Indonesia untuk menyesuaikan dengan kecenderungan kebudayaan politik yang berkembang dewasa ini, faktor berikutnya adalah cara pandang umat Islam Indonesia yang tidak lagi mendasarkan diri pada kesamaan agama, tetapi pada bentuk-bentuk profesional. Misalnya, apa pun asas partainya, bila terbukti meningkatkan kesejahteraan rakyat, menegakkan keadilan ekonomi, menegakkan kepentingan pendidikan dan hukum, mengentaskan kemiskinan, menurunkan harga bahan-bahan pokok—walaupun hanya sebatas janji dalam kampanye—maka partai tersebut akan berhasil membujuk simpati rakyat.

Pandangan tersebut selaras dengan tesis James M Buchanan dan Roger D Congleton, pengamat politik berkebangsaan Amerika, yang mengatakan bahwa, asas dan ideologi politik menjadi tidak penting ketika politik sudah tidak mampu lagi membela kepentingan rakyat. Sebab, kepentingan rakyat di atas segala-galanya.²⁹ Tesis James M Buchanan

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Barangkali statemen James M Buchanan dan Roger D Congleton inilah mendorong para penganut partai nasionalis untuk tidak menjadikan isu agama sebagai asas partai yang dianut. Dan, terbukti, di berbagai negara, setiap partai yang berhasil membuktikan pada rakyat; mengangkat derajat kehidupan rakyat dalam berbagai aspek, justru terbukti lebih diminati dari pada partai yang hanya

²⁷ Krwadi, *Islam kultural dan Islam Politik: Tinjauan Terhadap Eksistensi Partai-Partai Berasas Islam di Era Reformasi*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004), hlm. 23.

dan Roger D Congleton di atas juga sesuai dengan tesis mendiang Profesor Deliar Noer yang pernah mengeluarkan rumusan tentang politik Islam, dan sempat memanas telinga kalangan elite politik Islam di Indonesia. Menurut Deliar Noer, dalam konteks Indonesia, Islam adalah mayoritas secara sosiologis, tetapi minoritas secara politik. Dengan ungkapan lain, walaupun penduduk Indonesia adalah mayoritas beragama Islam yang jumlahnya hampir 90%, namun dalam realitas politik hampir selalu dalam posisi minoritas, karena isu “Islam” tidak menjadi daya tawar tinggi di mata pemilih.³⁰

Buktinya, pemilu pertama yang dianggap paling demokratis di Indonesia pada tahun 1955 menghasilkan totalitas perolehan suara partai-partai Islam hanya sekitar 43,5 persen. Pada saat itu, partai Islam terbesar seperti Masyumi hanya mendapatkan suara sekitar 20,9% atau 57 kursi, berada di posisi kedua setelah Partai PNI yang memperoleh suara sebesar 22,32%. Pemilu demokratis kedua yang berlangsung setelah era sistem otoriter Orde Baru pada tahun 1999 kembali mengkonfirmasi kebenaran tesis Deliar Noer. Keseluruhan perolehan suara parpol Islam dan parpol berbasis Islam bahkan merosot dari pemilu ke pemilu. Misalnya, PPP sebagai salah satu parpol Islam yang masih bertahan merosot terus perolehan suaranya dari 10,71 persen pada pemilu 1999, 8,15 persen pada pemilu 2004, dan bahkan 5,32%

pada pemilu 2009.

Menyikapi kenyataan itu, penulis tidak mengatakan bahwa pijakan “islam politik” salah, sedangkan pijakan “islam kultural” benar. Atau sebaliknya, pijakan “islam politik” benar, sedangkan pijakan “islam kultural” salah. Sama sekali tidak. Hemat penulis, baik “islam politik” maupun “islam kultural” sama-sama dituntut untuk berdiri di atas kepentingan rakyat, sehingga berdaya jual tinggi. Disinilah partai-partai Islam, apa pun pijakannya—bila memang tidak bisa disatukan—sebenarnya ditantang untuk “berideologi sama”. Penyamaan ideologi ini akan memberi kepastian kesamaan partai-partai Islam di Indonesia terhadap publik, meskipun tanda gambar dan warna dasar partai tampak berbeda.

Tanpa adanya penyamaan ideologi antarsesama partai Islam, masyarakat muslim Indonesia di level akar rumput tidak akan bisa membedakan antara partai Islam dan partai nasionalis dalam tataran praksis. Masyarakat muslim hanya bisa mengenal perbedaan secara formal antara PKS dengan Golkar, PPP dengan PDIP, PKB dengan Gerindra, saat kampanye politik berlangsung. Demikian pun, masyarakat muslim juga (hanya) bisa mengenal perbedaan antara partai Islam dan partai nasionalis dalam pernyataan politik menjelang dan sesudah diadakannya Munas, Kongres partai atau pun Muktamar.

Tetapi, pada saat partai-partai Islam berinteraksi dengan partai-partai nasionalis di parlemen dan di dalam pemerintahan, masyarakat muslim tidak bisa membedakan antara partai Islam dan partai nasionalis. Bahkan, naifnya, sekilas tampak sama antara partai Islam dan partai nasionalis; sama-sama mementingkan kepentingan

“menjual” agama sebagai asas keptartaian. Lihat, James M Buchanan dan Roger D Congleton, *Politics by Principle, Not Interest: Toward Nondiscriminatory Democracy*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), hlm. 117.

³⁰ Deliar Noer, *Islam & Politik*, (Jakarta: Yayasan Risalah, 2003), hlm. 33.

jangka pendek yang tidak pro rakyat, apalagi umat muslim. Kenyataan itu tampak jelas ketika menerima atau menolak suatu kebijakan. Dalam kasus pengucuran dana talangan oleh pemerintah kepada Bank Century sebesar 6,7 triliun, misalnya, nyaris tidak tampak perbedaan haluan politik antara partai Islam dan partai nasionalis terkait kebijakan tersebut. Baik partai Islam maupun partai nasionalis sama-sama berjuang untuk menyelamatkan kepentingan jangka pendek dari masing-masing parpol. Bahkan, dalam kasus itu nampak kesan beberapa partai Islam justru membela kepentingan pemerintah, sekalipun bertentangan dengan hati nurani rakyat. Lantas, di manakah asas politik Islam yang berpijak pada “Islam politik” atau pun “Islam kultural”?

Tidak mengherankan bila kenyataan itu melahirkan persepsi negatif di benak publik, bahwa Islam hanya didistorsikan sekadar sebagai “label” atau kemasam bagi parpol Islam dan parpol berbasis Islam untuk merebut simpati mayoritas sosiologis yang diharapkan bisa diubah menjadi mayoritas politik. Tidak mengherankan pula jika masyarakat muslim Indonesia menjatuhkan pilihan kepada partai nasionalis yang tidak beridentitas agama secara formal. Karena itu pula, dalam sejarah perpolitikan di tanah air, partai nasionalis yang selalu menjadi pemenang utama. Misalnya, PNI yang memenangkan Pemilu 1955, PDI Perjuangan memenangkan Pemilu 1999, Partai Golkar memenangkan pemilu 2004, dan Partai Demokrat yang memenangkan Pemilu 2009.

Atas dasar itu, untuk bisa menjadi pemenang utama di kancah perpolitikan nasional, munculnya gagasan konfe-

derasi³¹ menjadi sangat relevan. Kedepan, beberapa partai berhaluan Islam patut menggagas konfederasi. Konfederasi adalah opsi penggabungan partai-partai Islam dalam satu payung berdasarkan perjanjian-perjanjian yang disepakati. Menyambut pemilu 2014, misalnya, opsi konfederasi menjadi sangat rasional. Pasalnya, konfederasi adalah strategi ampuh dalam rangka menghadapi wacana peningkatan *parliamentary threshold*³² (PT) sebesar

³¹ Pengertian hakiki dari istilah konfederasi sebenarnya adalah bentuk perserikatan antara negara merdeka berdasarkan perjanjian atau undang-undang, misalnya yang menyangkut berbagai kebijakan bersama. Dalam hukum internasional, bentuk konfederasi tidak diakui sebagai negara berdaulat tersendiri karena masing-masing negara yang membentuk konfederasi tetap memiliki kedudukan internasional sebagai negara berdaulat. Misalnya, konfederasi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), konfederasi ASEAN. Namun, istilah konfederasi merembet dan sering pula digunakan dalam ranah politik. Dalam ranah politik, istilah konfederasi adalah suatu metode atau cara, bagaimana partai-partai bisa berjuang dalam satu wadah, namun bukan penyatuan partai menjadi satu partai. Artinya, setiap partai masih tetap punya simbol sendiri, identitas sendiri, lambang sendiri, namun bergerak dalam satu kesepahaman dan kesepakatan. Tujuannya adalah, mencegah suara pemilih menjadi hilang di parlemen, serta mempermanenkan kekuatan partai-partai politik pendukung atau oposisi pemerintah. Konfederasi partai politik bisa berlaku untuk pemilu legislatif atau pun pemilihan presiden. Lihat, M Shaleh Khalid, *Fraksi Islam Menuju Konfederasi Partai-Partai Islam*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 1999), hlm. 8. Bandingkan dengan, John Hamilton Gray, *Confederation: or, The political and Parliamentary History of Canada, From The Conference At Quebec, in October, 1864, to the Admission of British Columbia, in July, 1871*, (New York: Copp, Clark, & Co., Printers, 1872), hlm. 45.

³² *Parliamentary threshold* adalah ketentuan batas minimal yang harus dipenuhi Partai Politik untuk bisa menempatkan calon legislatifnya di parlemen. Bila Parpol tidak memperoleh suara sesuai dengan batas *Parliamentary threshold*, maka parpol tersebut tidak berhak mempunyai perwakilan di DPR. Sehingga, suara yang telah diperoleh oleh parpol tersebut dianggap hangus. Sebagai contoh, dalam Pemilu 2009, batas minimal yang diatur dalam Pasal 202 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif adalah sebesar 2,5 persen dari total jumlah suara dalam pemilu. Jadi, bila sebuah partai tidak mendapatkan suara minimal 2,5 persen, maka tidak

lima persen pada Pemilu 2014. Di Pemilu 2009, banyak partai Islam yang tidak bisa mengutus kadernya ke senayan karena perolehan suara tidak mencapai *parliamentary threshold*. Padahal, pemberlakuan *parliamentary threshold* di Pemilu 2009 hanya berjumlah 2,5 % dari total jumlah suara dalam pemilu. Dengan batas *parliamentary threshold* yang relatif kecil itu—bila dibandingkan dengan wacana *parliamentary threshold* sebesar 5% pada Pemilu 2014—banyak partai Islam tidak berhasil melayang ke senayan. Sebut saja, misalnya, PMB, PBR, PKNU, dan PNU. Dan, hanya tiga partai dari tujuh partai Islam yang berhasil mencapai *parliamentary threshold*, yaitu PKS, PPP dan PKB.

Bila konfederasi politik dapat dilakukan oleh partai-partai Islam, elektabilitas partai Islam pun akan semakin meningkat karena bergerak dalam satu wadah, meskipun antara satu dengan yang lain masih dibedakan antara pijakan “islam politik” dan “islam kultural”. Namun, pijakan itu tidak akan berpengaruh sama sekali karena mereka terikat dengan satu kesepahaman politik; memajukan masyarakat Islam dengan satu kesepakatan politik.

Untuk mempertahankan keberadaan partai Islam sebagai wadah aspirasi umat Islam yang mayoritas di Indonesia, mau tidak mau, suka atau tidak suka, langkah membangun aliansi strategis seperti konfederasi mutlak dilakukan. Ideologi “Islam politik” dan “Islam kultural” harus segera disingkirkan agar partai-partai

bisa mengutus kadernya duduk di senayan. Lihat, TA Legowo & Sebastian Salam, *Panduan Menjadi Calon Anggota DPR/DP/ DPRD Menghadapi Pemilu*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm. 82.

bisa duduk bersama dalam satu wadah. Langkah ini adalah salah satu strategi untuk mempertahankan simbol Islam dalam pentas perpolitikan nasional. Bila ada kemauan politik (*political will*) untuk membentuk konfederasi antarpartai Islam, hemat penulis, para wakil rakyat dari partai Islam di DPR hanya tinggal merumuskan aturan mengenai konfederasi dalam Undang-undang politik. Pertanyaannya, apakah partai Islam menghendaki konfederasi? Atau justru sebaliknya, tetap bergerak berdasar egoisme politik masing-masing?

Politik Populis dan Identitas Islam

Seandainya tidak muncul perubahan mendasar, kedepan, partai Islam akan mengalami kecenderungan penurunan perolehan suara yang tajam. Tidak hanya itu, yang patut dikhawatirkan adalah, bila kalangan elite partai Islam tidak melakukan sesuatu yang berarti, bukan tidak mungkin partai Islam akan kehilangan massa. Kalangan elite politik Islam harus menyadari, stabilitas peta kekuatan politik dijamin oleh sistem partai aliran yang berbasis kelompok masyarakat primordial dan ditopang oleh kepemimpinan kharismatik dan patronalisme.

Orang bisa saja mengatakan bahwa partai Islam tidak akan pernah mati. Pasalnya, era reformasi seperti saat ini memberi kesempatan seluas-luasnya bagi setiap kelompok, termasuk Islam, untuk mengimplementasikan apa yang mereka imajinasikan dengan bentuk partai politik. Artinya, struktur politik Indonesia pasca Orde Baru memberi ruang kebebasan kepada siapa saja untuk mendirikan partai politik. Oleh

karena itu, dalam setiap pagelaran Pemilu, dapat dipastikan akan banyak muncul partai Islam baru. Di Pemilu 2009, misalnya, muncul partai Islam baru bernama PKNU, PMB, dan beberapa partai Islam yang lain.³³

Namun, adanya alasan ruang kebebasan mendirikan partai politik Islam, tanpa diiringi dengan perubahan signifikan, tentu tidak mampu mendongkrak perolehan suara partai Islam. Untuk sekadar ikut Pemilu, bisa saja partai Islam yang baru muncul dengan mudah lolos dalam verifikasi. Namun demikian, sebagai partai politik tidak cukup hanya lolos verifikasi dan ikut dalam pemilu. Bagi kalangan elite politik Islam, seharusnya yang menjadi perhatian utama bukanlah kebebasan mendirikan partai di era reformasi atau pun kemudahan verifikasi partai politik sebagai peserta Pemilu. Namun, yang menjadi persoalan adalah bagaimana penguatan partai Islam untuk bisa bersaing dengan partai-partai nasionalis seperti Partai Demokrat, Partai Golkar, PDIP, dan lain sebagainya, termasuk juga membangun kekuatan politik Islam yang signifikan di masa mendatang.

³³ Beberapa partai politik Islam yang baru muncul tumbang satu persatu di tengah jalan. Artinya, kalangan elite politik Islam hanya bisa mendirikan partai Islam, namun tidak bisa menghidupkan, melestarikan, dan mempertahankan politik Islam itu sendiri. Misalnya, PKNU dan PMB didirikan menjelang Pemilu 2009. Namun, ketika ikut Pemilu 2009, justru tenggelam karena tidak lolos *parliamentary threshold*. Selain kedua partai Islam tersebut, PBB juga termasuk salah satu partai Islam yang didirikan di era reformasi. Namun, partai tersebut akhirnya tenggelam di tengah jalan karena juga tidak lolos *parliamentary threshold* ketika ikut Pemilu 2009. Bahkan, muncul rumor PBB akan bergabung dengan PPP. Bukan tidak mungkin, kedepan, bila tidak ada perubahan *platform* di tubuh partai Islam, akan banyak partai Islam yang tenggelam di tengah jalan—dengan tidak mengatakan mati.

Partai Islam akan bisa bertahan, bahkan bisa meningkatkan elektabilitasnya tanpa harus berubah menjadi partai nasionalis. Bila ada yang mengatakan partai Islam bisa besar jika berubah menjadi partai nasionalis, pikiran itu sama sekali tidak berdasar. Partai Islam masih bisa menjadi salah satu kekuatan penting dalam kancah perpolitikan di Indonesia tanpa harus meninggalkan identitas ke-Islaman, dan tanpa berubah menjadi partai nasionalis. Memang, fakta di lapangan memperlihatkan partai Islam kecil, namun sebenarnya hal itu bukan karena identitas ke-Islamannya, melainkan semata-mata disebabkan oleh kesalahan menjalankan sistem politik Islam, serta faktor kelemahan sumber daya manusianya.

Bagi partai Islam, tidak perlu meninggalkan konsepsi Islam bila ingin berdemokrasi, bergaul dengan masyarakat plural atau demi kepentingan apa pun. Sebab, saat ini yang perlu dibenahi adalah kemampuan personal kader-kader partai Islam yang memang selama ini terlalu lemah dan mudah diceraiberaikan. Semua harus mengakui, apabila partai Islam mati, harapan masyarakat muslim di Indonesia untuk mendapatkan dukungan politik akan sirna. Ketika dukungan politik bagi umat Islam hilang, harapan untuk mendapatkan peraturan perundang-undangan yang berpihak pada umat Islam semakin menipis. Atas dasar itu, adalah wajar bagi kalangan elite politik Islam untuk tetap mempertahankan politik identitas keislaman.

Sebagaimana yang dikatakan Martin J Dent dalam *Identity Politics: Filling The Gap Between Federalism And Independence* (2004), politik iden-

titas adalah, tindakan politis untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berdasarkan pada ras, etnisitas, gender, atau keagamaan.³⁴ Dalam konteks politik identitas keislaman, partai politik Islam dituntut untuk mengangkat harkat dan derajat masyarakat muslim Indonesia. Namun, politik identitas keislaman tidak akan memberikan arti sama sekali bila kalangan elite politik Islam tidak mampu menerjemahkan identitas ideologi ke dalam program-program nyata. Sehingga, publik tidak bisa melihat adanya perbedaan antara partai sekuler dan partai Islam.

Bila partai Islam masih ingin memegang peranan penting dalam panggung politik di tanah air, maka politik identitas keislaman harus diterjemahkan menjadi politik populis. Selama ini identitas keislaman tidak tampak ke permukaan karena politik identitas keislaman diterjemahkan sebagai politik kepentingan, sebuah tindakan yang salah kaprah. Misalnya, lahirnya kesan di tengah masyarakat tentang inkonsistensi para politikus partai Islam: dakwah mereka mengenai Islam yang menekankan persatuan dan persaudaraan tak terwujud dalam praktik politik mereka. Terbukti, beberapa partai Islam menderita perpecahan internal, sehingga menyulitkan mobilisasi.

Populisme (baca: politik populis) adalah politik identitas sebagai lawan dari politik kepentingan. Dalam konteks partai Islam, populisme

adalah filsafat politik yang mendukung hak dan kekuasaan massa Islam di level akar rumput—termasuk juga kekuasaan rakyat—yang biasanya menentang kalangan elit istimewa.³⁵ Populisme politik mengejar reformasi, bukan revolusi. Para simpatisan partai Islam di level akar rumput mengetahui masalah apa saja yang harus dihadapi, serta mengetahui strategi apa untuk menghadapinya. Para pemimpin partai Islam yang populis dituntut menawarkan janji-janji yang jelas untuk menyingkirkan apa yang dianggap sebagai ketidakadilan.

Bila partai Islam mengedepankan praktik politik populis, maka dalam kiprahnya lebih berdasarkan jumlah kepala. Misalnya, dalam politik populis, seorang “kiyai” dalam partai Islam (PKB, PKNU, PPP, dan lain-lain) sama dengan seorang tukang becak, petani, nelayan, tukang sayur, karena diikat oleh tanda yang sama, seperti agama yang sama. Sehingga, secara tidak langsung, gerakan politik populis menekankan sistem regenerasi kepemimpinan partai politik secara adil dan merata, tidak hanya terfokus pada sosok-sosok tertentu.

Partai Islam di Indonesia yang berani menerapkan sistem politik populis seperti di atas barangkali hanya PKS. PKS berani mengganti pucuk pimpinan partai demi sebuah regenerasi. Misalnya, ketika Presiden PKS Hidayat Nur Wahid terpilih sebagai Ketua PMR pada tahun 2004, jabatan Presiden PKS langsung digantikan oleh Tifatul Sembiring. Demikian pun, pada saat Tifatul Sembiring diangkat

³⁴ Martin J Dent, *Identity Politics: Filling The Gap Between Federalism And Independence*, (London: Ashgate Publishing, 2004), hlm. 44

³⁵ Henri Deleersnijder, *Populisme: Vieilles Pratiques, Nouveaux Visages*, (Paris: Luc Pire Editions, 2006), hlm. 66.

sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), posisinya di PKS segera digantikan oleh Luthfi Hasan Ishaq. Tidak hanya itu, Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS, Suharna Surapranata, secara resmi mengundurkan diri menyusul penunjukkan sebagai menteri dalam Kabinet Pembangunan Indonesia Bersatu II pada tahun 2009.

Hemat penulis, pergantian kepemimpinan sebagaimana yang menjadi budaya di PKS merupakan bentuk konsistensi PKS dalam menjaga komitmen politik populis. Budaya ini tidak hanya dijalankan PKS di tingkat pusat, tetapi juga mentradisi di kepengurusan daerah, mulai dari propinsi, kabupaten dan kota, bahkan hingga ke tingkat kecamatan. Dengan politik populis semacam ini, tidak ironis bila tren dan perolehan suara PKS semakin meningkat.

Pada Pemilu 1999, misalnya, saat itu PKS bernama Partai Keadilan (PK) mendapatkan suara sebesar 1,436,565 dengan jumlah 7 kursi di DPR. Pada Pemilu 2004, setelah merubah nama menjadi PKS, PKS mendapatkan suara 8.325.020 suara dengan 45 kursi di DPR. Pada Pemilu 2009, PKS mendapatkan 57 kursi di DPR dan 3 menteri.³⁶ Perolehan suara ini menghantarkan PKS ke posisi keempat perolehan suara secara nasional setelah Partai Demokrat, Partai Golkar dan PDIP. PKS juga mampu menjadi partai Islam terbesar diantara partai-partai Islam lainnya.

Berbeda halnya dengan politik kepentingan yang selama ini dijalankan—baik dijalankan secara sengaja atau pun tidak disengaja—oleh partai Islam

³⁶ <http://pks-jepang.org>, edisi 19 Juni 2010, diakses tanggal 9 September 2011.

lainnya. Politik kepentingan “terpaku” pada kalangan elite. Misalnya, di tubuh partai Islam lainnya—tanpa perlu menyebutkan nama partai—jabatan elite partai “hanya” diisi oleh kalangan yang menyandang predikat “kiyai”, “putra kiyai”, “kerabat kiyai”, dan kalangan elite lainnya yang bersifat homogen. Bahkan, diantara beberapa partai Islam yang masih eksis di Indonesia, posisi pucuk pimpinan partai selalu diisi oleh satu sosok hingga melebihi dua periode, bahkan lebih. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah tidak ada kader mumpuni dan profesional lainnya selain satu sosok tersebut? Tradisi semacam ini harus segera ditinggalkan dan mencoba menghidupkan politik populis. Jika tidak, cepat atau lambat, partai Islam akan ditinggal simpatisannya karena dianggap sebagai partai homogen.³⁷

Pada sisi yang lain, politik populis menuntut partai Islam mengikuti hukum “kurva lonceng” bahwa sebagian besar orang tidak menggandrungi perubahan radikal dan ekstrem partai Islam yang harus keluar dari *captive market*-nya dengan merambah konstituen baru yang selama ini bernaung di rumah-rumah partai nasionalis. Artinya, partai Islam harus menawarkan program-program kesejahteraan rakyat yang lebih terukur, tidak lagi mengandalkan retorika berdasar sentimen agama semata.

Penguatan-penguatan politik identitas yang tidak dilandasi semangat populisme dapat membuat konflik,

³⁷ Hal ini bisa dilihat di posisi “Dewan Syuro”, “Majlisi Syuro”, bahkan juga posisi ketua umum di beberapa partai Islam—dengan tidak mengatakan semuanya. Kenyataan ini tidak hanya terjadi di tingkat pusat, tetapi juga merembet ke pengurusan partai di tingkat daerah.

baik konflik internal maupun eksternal di kalangan masyarakat bawah. Oleh karena itu, dengan tetap mempertahankan politik identitas keislaman, semangat populisme sangat penting untuk selalu dikumandangkan, dilaksanakan dan dipelihara demi ketahanan politik Islam saat ini dan yang akan datang.

Kesimpulan dan Penutup

Dari uraian panjang di atas, sangat mudah sebenarnya memprediksi bagaimana prospek politik Islam atau parta-partai berlandaskan Islam di masa-masa yang akan datang. Bila politik Islam masih terpecah pada beberapa partai besar maupun kecil, tidak ada kesamaan visi dan misi, tidak ada figure pimpinan yang dominan, dan kemampuan managerial partai yang masih belum signifikan, maka masa depan politik Islam di Indonesia masih cukup buram. Sebaliknya, bila kalangan elite politik Islam mampu memelopori rekonsiliasi partai-partai berlandaskan Islam yang memiliki potensi perolehan suara sekitar 60%, tentu saja prospek politik Islam di Indonesia masih sangat cerah.

Andai kata partai-partai Islam sudah tidak mungkin lagi disatukan, atau pun sekadar melakukan rasionalisasi jumlah partai ke titik paling minimal, pilihan terakhir bagi partai Islam adalah melakukan gerakan politik populis untuk mempertahankan politik identitas keislaman. Caranya adalah, membangun pola kepemimpinan yang lebih sinergi dengan menyatukan kepemimpinan politik Islam dengan melakukan penokohan berjenjang atau melalui konsensus-konsensus paling rasional berdasarkan kualitas dan

peluang politik secara lebih tersistem.

Walaupun pada kenyataannya partai-partai Islam tidak bisa disatukan, tetapi totalitas suara penduduk muslim di Indonesia yang hampir mencapai 90% berhasil diraup secara keseluruhan oleh partai-partai Islam, tentu hal tersebut adalah prestasi yang sangat membanggakan. Yang penting, suara 90% masyarakat muslim dari totalitas masyarakat Indonesia tidak lari ke kelompok lain. Untuk mencapai hal tersebut, kini saatnya partai politik Islam mengembangkan peta politik umat Islam sebagai basis konstituen politik yang konkret, sekaligus melakukan pemetaan sosiologi politik masyarakat Indonesia untuk kepentingan politik Islam.

Tidak hanya itu, reformasi relasi antara partai politik Islam dan kekuatan-kekuatan organisasi kemasyarakatan, yang sering menimbulkan ketegangan dan konflik kepentingan yang serius dan melahirkan kebingungan umat Islam dalam melangkah ke masa depan, mutlak dilakukan.[]

DAFTAR PUSTAKA

- "Sejarah Indonesia Modern 1200-2008", terj. *A History of Modern Indonesia Since c. 1200 Fourth Edition* karya M.C. Ricklefs, Jakarta: Penerbit Serambi, 2008.
- Asfar, Muhammad, *Pemilu dan Perilaku Memilih, 1955-2004*, Jakarta: Eureka, 2006.
- Buchanan, James M dan Congleton, Roger D, *Politics by Principle, Not Interest: Toward Nondiscriminatory Democracy*, Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

- Daman, H. Rozikin, *Membidik NU: Dilema Percaturan Politik NU Pasca Khittah*, Jakarta: Gama Media, 2001.
- Deleersnijder, Henri, *Populisme: Vieilles Pratiques, Nouveaux Visages*, Paris: Luc Pire Editions, 2006.
- Dent, Martin J, *Identity Politics: Filling The Gap Between Federalism And Independence*, London: Ashgate Publishing, 2004.
- Fahmi, Nashir, *Menegakkan Syariat Islam ala PKS*, Jakarta: Era Intermedia, 2006.
- Ghazali, Abd. Rohim, dkk, *Muhammadiyah & Politik Islam Inklusif*, Jakarta: Maarif Institute for Culture and Humanity, 2005.
- Gray, John hamilton, *Confederation: or, The political and Parliamentary History of Canada, From The Conference At Quebec, in October, 1864, to the Admission of British Columbia, in July, 1871*, New York: Copp, Clark, & Co., Printers, 1872.
- <http://itempoeti.com/2010/06/pks-dari-eksklusif-ke-inklusif-metamorphosa-ataukah-mimikri/>
- <http://pks-jepang.org>
- Ismail, Faisal, *Menabur Inklusivisme, Mengubur Eksklusivisme: Visi dan Misi Islam Pluralis*, Yogyakarta: Mitra Cendekia, 2005.
- Khalid, M Shaleh, *Fraksi Islam Menuju Konfederasi Partai-Partai Islam*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 1999.
- Karwadi, *Islam kultural dan Islam Politik: Tinjauan Terhadap Eksistensi Partai-Partai Berasas Islam di Era Reformasi*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Laybourn, Keith, *Fifty Key Figures in Twentieth-Century British Politics*, London: Routledge, 2002.
- Legowo, TA & Salam, Sebastian, *Panduan Menjadi Calon Anggota DPR/DP/DPD Menghadapi Pemilu*, Jakarta: Forom Sahabat, 2008.
- Luth, Thohir, M. Natsir: *Dakwah dan Pemikirannya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Maarif, Ahmad Syafii, *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin, 1959-1965*, Jakarta: Gema Insani, 1996.
- Noer, Deliar, *Islam & Politik*, Jakarta: Yayasan Risalah, 2003.
- Philpott, Simon, *Meruntuhkan Indonesia: Politik Postkolonial dan Otoritarianisme*, Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2003.
- Rahmat, M. Imdadun, *Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus Ke Gedung Parlemen*, Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2008.
- Sampson, Anthony, *Mandela: The Authorized Biography*, New York: Paw Prints, 2008.
- Seliger, Martin, *Ideology And Politics*, New York: Allen & Unwin, 1976.
- Tim Penulis PustakaTimur, *Profil Partai Politik Peserta Pemilu 2009: (pedoman pelaksanaan kampanye pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan anggota DPRD, zona dan kelompok kampanye)*, Jakarta: Pustaka Timur, 2008.
- Wahid, Abdurrahman, *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, Jakarta: Wahid Institute, 2009.
- Watt, William Montgomery, *Islamic Political Thought*, London: Edinburgh University Press, 1998.
- www.lsi.or.id